



KPKNL
PALOPO

LAPORAN KINERJA

KPKNL PALOPO 2024



IDAMAN
Ikhlas dan Andal dalam
Melayani

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Palopo disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Palopo di tahun 2024 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIN KPKNL Palopo tahun 2024 disusun berdasar dan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan di atas, serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian Visi DJKN yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, KPKNL Palopo sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai Misi antara lain mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

LAKIN KPKNL Palopo Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja KPKNL Palopo melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Perjanjian Kinerja KPKNL Palopo tahun 2024. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Nomor KEP-32/WKN.15/2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat Tahun 2024 adalah 116,40% dari 11 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi, dukungan dan sinergi semua pihak baik di internal, maupun dengan semua *stakeholders* di lingkungan KPKNL Palopo.

Demikian LAKIN ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian Visi dan Misi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban KPKNL Palopo khususnya di tahun 2024. LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai sarana pembinaan, pengendalian, dan pengevaluasian, serta penilaian kinerja secara kualitatif dan kuantitatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palopo.

Akhir kata, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya untuk mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas, kepada segenap jajaran pegawai KPKNL Palopo. Kami juga berterima kasih atas segala saran, masukan dan kritik dari seluruh *stakeholder* sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di masa-masa mendatang.

Palopo, 24 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik
Naf'an Widiarso Rafid





DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis KPKNL Palopo	6
D. Aspek Strategis Organisasi.....	7
E. Permasalahan Utama	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	51
Lampiran	52



IKHTISAR EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Akuntabilitas Kinerja KPKNL Palopo dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, disampaikan kepada *stakeholder* melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Palopo tahun 2024. Sebagai laporan pencapaian kinerja, LAKIN KPKNL Palopo tahun 2024 menjadi bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi KPKNL Palopo yang merupakan unit vertikal DJKN yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal tersebut selanjutnya menjadi sarana untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam rencana kerja KPKNL Palopo yang mengacu pada visi dan misi DJKN. Lakin KPKNL Palopo tahun 2024 terdiri dari 11 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan motto “IDAMAN, Ikhlas dan Andal dalam Melayani” segenap jajaran pegawai KPKNL Palopo bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun (RKT) 2024 dengan penuh Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan BSC, rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 20 IKU yang merupakan penjabaran dari 11 sasaran strategis Kemenkeu *Three* KPKNL tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	130,39%
		1c-CP	Indeks Integritas	89,17	92,44
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,5%	87,47%
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,5%	96,67%
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	116,80%
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	267,27%
4.	Layanan Penilaian yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75%	120%
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	131,87%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	121,16%
6.	Persentase saldo <i>outstanding</i> Berkas Kasus Piutang Negara	6a-CP	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	85%	69,23%
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%	100,68%



7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85%	90,81%
		8b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	119%
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	120%
		9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	0%
		9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80%	100%
11.	Penguatan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N	Penguatan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	82%	95,45%
		11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan ZI WBK	100%	120%

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 serta telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Nomor KEP-32/WKN.15/2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat Tahun 2024 adalah 116,40%. Nilai ini diperoleh berdasarkan raihan KPKNL Palopo pada 20 IKU yang dikelompokkan dalam 11 Sasaran Strategis (SS).



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Palopo dituntut untuk *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu perwujudan dari asas akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Palopo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Palopo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

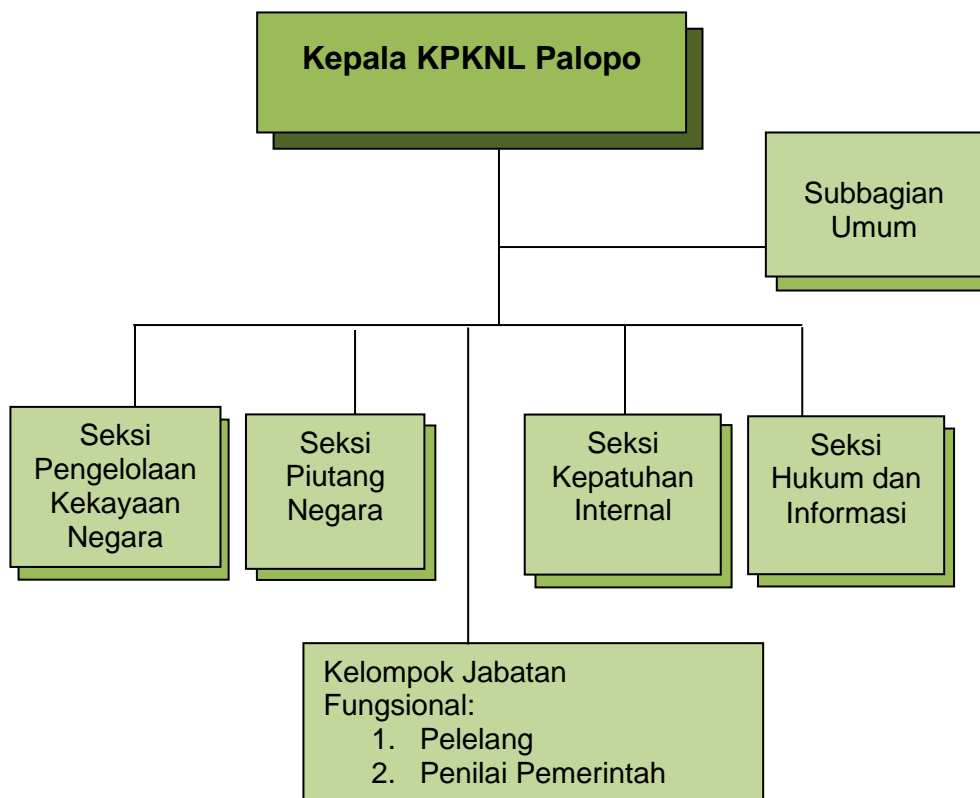
1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;



3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Palopo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor/Administrator), 5 (lima) Jabatan Struktural eselon IV.a (Kepala Subbag/Seksi) dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 2 (dua) Fungsional Pelelang dan 2 (dua) Fungsional Penilai Pemerintah, sebagaimana bagan berikut:

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo



Bagan tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:



1. **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL Palopo.
2. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. **Seksi Piutang Negara**, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. **Seksi Hukum dan Informasi**, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, **jaringan**, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. **Seksi Kepatuhan Internal**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. **Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah**, mempunyai tugas menyusun konsep standar proses penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
7. **Jabatan Fungsional Pelelang**, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen objek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, petikan, kutipan risalah lelang, serta penggalian potensi lelang.

Wilayah kerja KPKNL Palopo meliputi 7 (tujuh) kota dan/atau kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Kota Palopo



2. Kabupaten Luwu
3. Kabupaten Luwu Utara
4. Kabupaten Luwu Timur
5. Kabupaten Tana Toraja
6. Kabupaten Toraja Utara
7. Kabupaten Enrekang

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan Desember 2024, KPKNL Palopo didukung oleh 19 (sembilan belas) orang pegawai dari berbagai bidang keahlian dengan komposisi pegawai KPKNL Palopo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur sebagai berikut:

Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan:

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	-	2	13	1	16
Perempuan	-	2	1	-	3
Total	-	4	14	1	19

Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Pendidikan Terakhir:

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SLTA	-	-	-	-	-
2.	DI	-	-	-	-	-
3.	DIII	-	4	1	-	5
4.	DIV	-	-	-	-	-
5.	S1	-	-	9	-	9
6.	S2	-	-	4	-	4
7.	S3	-	-	-	1	1
TOTAL		-	4	14	1	19

Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jabatan Fungsional:

No.	Jabatan fungsional	Jumlah
1	Pelelang	2
2	Penilai	2
Total		4



Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jabatan Fungsional Teknis:

No.	Jabatan fungsional teknis	Jumlah
1	PBJ	1
2	Pemeriksa Piutang Negara	1
3	Jurusita	1
Total		3

Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi KPKNL Palopo serta sebagai alat penunjang dalam menjalankan kegiatan operasional kantor. KPKNL Palopo saat ini menempati sebagian (*sharing*) Gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo (pinjam pakai), yang terletak di Jalan Andi Kambo Nomor 55, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Berikut kondisi sarana dan prasarana KPKNL Palopo :

1. Rumah Negara

Rumah Negara yang berada di KPKNL Palopo berjumlah 8 (delapan) unit yang terdiri dari:

- a. 4 (unit) unit rumah negara terletak di Jalan K.H. Ahmad Razak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Palopo;
- b. 1 (satu) unit rumah negara terletak di Jalan Sawerigading, Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;
- c. 3 (tiga) unit rumah negara terletak di Jalan Pongsimpin Lorong SD, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Palopo.

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua di KPKNL Palopo berjumlah 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari:

No.	KANTOR	RODA 2				RODA 4				TOTAL
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml	
1	KPKNL Palopo	5	-	-	5	4	1	-	5	10



C. PERAN STRATEGIS KPKNL PALOPO

KPKNL Palopo sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang mempunyai peran strategis dalam beberapa hal yaitu:

1. Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara

Peran strategis KPKNL Palopo di bidang pengelolaan BMN yaitu dengan cara melakukan optimalisasi pengelolaan BMN yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan Negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna BMN telah dilakukan dengan cara utilisasi kekayaan Negara (PSP, pemanfaatan, pemindahtanganan dan sebagainya), pengawasan dan pengendalian BMN, pembinaan, dan penatausahaan BMN. Dilakukan juga mekanisme untuk mengukur tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dibandingkan dengan perencanaan sesuai kebutuhan (SBSK), serta mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja BMN melalui portofolio aset, serta mengkoordinasikan kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah.

2. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara, penilaian mempunyai peranan penting dari proses pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan/atau BMN lain yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga. Estimasi atau perkiraan nilai wajar tersebut dapat digunakan baik dalam rangka penyusunan LKPP dan/atau pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Selain itu, selama tahun 2024, KPKNL Palopo juga telah melaksanakan penilaian aset milik pemerintah daerah (BMD) yang berada di wilayah kerja KPKNL Palopo, baik dalam rangka penetapan nilai limit untuk penjualan lelang, pemindahtanganan, maupun dalam rangka penyusunan neraca keuangan daerah.

3. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Palopo di bidang pegurusan piutang negara yaitu dalam rangka penyelamatan keuangan negara berupa piutang negara yang macet, baik yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun penyerahan dari pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga.



4. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang merupakan sarana transaksi jual beli yang terbuka untuk umum. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Dalam rangka memberikan pelayanan lelang, KPKNL Palopo terus melakukan upaya penggalian potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi. Keuntungan jual beli melalui lelang yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan memberikan kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa Risalah Lelang.

5. Memberikan Kontribusi kepada Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Setiap tahunnya, kontribusi KPKNL Palopo bagi penerimaan negara diwujudkan melalui setoran PNBP yang diperoleh dari biaya administrasi (biad) dalam pengurusan piutang negara, bea lelang dari pelayanan lelang, dan pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN. Kontribusi KPKNL Palopo bagi PNBP yang bersumber dari ketiga setoran tersebut, terinci di bagian lain laporan ini.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, KPKNL Palopo sebagai instansi vertikal di bawah naungan DJKN atau disebut juga kantor operasional dari Kantor Pusat DJKN, pada tahun 2024 telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal;



4. Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif, dan Efisien;
5. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif;
6. Penerapan tata Kelola Piutang negara dan Lelang yang produktif;
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel;
10. Komunikasi publik yang efektif;
11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

E. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam mencapai tujuan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat beberapa isu yang dihadapi KPKNL Palopo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

No.	Sasaran Strategis KPKNL Palopo	Isu
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan dalam optimalisasi BMN satker untuk memperoleh PNBPN 2. <i>Potential loss</i> akibat lelang TAP dan batal yang berpengaruh terhadap pencapaian PNBPN
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya kemungkinan <i>potential loss</i> akibat lelang yang TAP, terutama pada lelang HT; 2. Banyaknya lelang batal karena kendala administrasi seperti tidak terbitnya SKPT 3. Kendala teknis, misalnya <i>maintenance</i> aplikasi pembuatan SKPT
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari sisi debitor: <ol style="list-style-type: none"> a. Debitor (dan/atau ahli waris) tidak diketahui keberadaannya. b. Debitor telah meninggal dunia, ahli waris tidak mau mengakui utangnya. c. Debitor tidak merasa meminjam utang dan menyatakan namanya di catut pihak lain yang tidak mengenalnya. 2. Dari sisi barang jaminan: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat piutang Negara yang terindikasi sudah lunas (SHM telah dipindahtangankan ke pihak ketiga). b. Fisik barang jaminan belum dapat ditemukan (sudah dilakukan <i>asset tracing</i>, namun mengingat telah terjadi pemekaran dan SHM lama, masih perlu dilakukan pencarian kembali) c. Barang jaminan sepi peminat (sudah dilakukan lelang 6 kali (bahkan ada yang



		11 kali dilelang), namun tidak ada peminat).
4.	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	Tidak ada isu signifikan
5.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	Koordinasi dengan satker dan kantor pertanahan dalam sertifikasi BMN tanah
6.	Penerapan tata Kelola Piutang negara dan Lelang yang produktif	1. Permasalahan terkait lelang TAP/batal sebagaimana dijelaskan di atas 2. Permasalahan terkait pengurusan piutang negara sebagaimana dijelaskan di atas
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Tidak ada isu signifikan
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tidak ada isu signifikan
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Tidak ada isu signifikan
10.	Komunikasi publik yang efektif	Tidak ada isu signifikan
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Tidak ada isu signifikan

Namun demikian, dengan semangat “IDAMAN”, Ikhlas dan Andal dalam Melayani, KPKNL Palopo senantiasa memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimilikinya dalam mengoptimalkan segala peluang dan menjadikan setiap permasalahan serta isu yang dihadapi sebagai tantangan dalam memacu KPKNL Palopo untuk bekerja lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Di samping itu, perencanaan strategis juga merupakan proses sistematis berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang ada saat ini atau berpotensi yang dimiliki.

Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

1. VISI

DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai unit vertikal, visi KPKNL Palopo untuk tahun 2020-2024 mengacu pada visi DJKN 2020-2024 yaitu

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pada visi tersebut, profesional memiliki makna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan



perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kontributif berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. Instrumental berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. Otoritatif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional;
- d. Berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum; dan
- e. Adaptif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya.

2. MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, DJKN telah menetapkan 5 (lima) misi, sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3. TUJUAN

Untuk mengimplementasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun periode waktu tertentu serta menyelaraskan arah yang strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, perlu adanya suatu tujuan. DJKN memiliki 4 tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu:



- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

4. SASARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, DJKN mempunyai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis sendiri merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - 1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - 2) Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
- d. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - 1) Organisasi dan SDM yang optimal;
 - 2) Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - 3) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - 4) Komunikasi publik yang efektif.

B. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

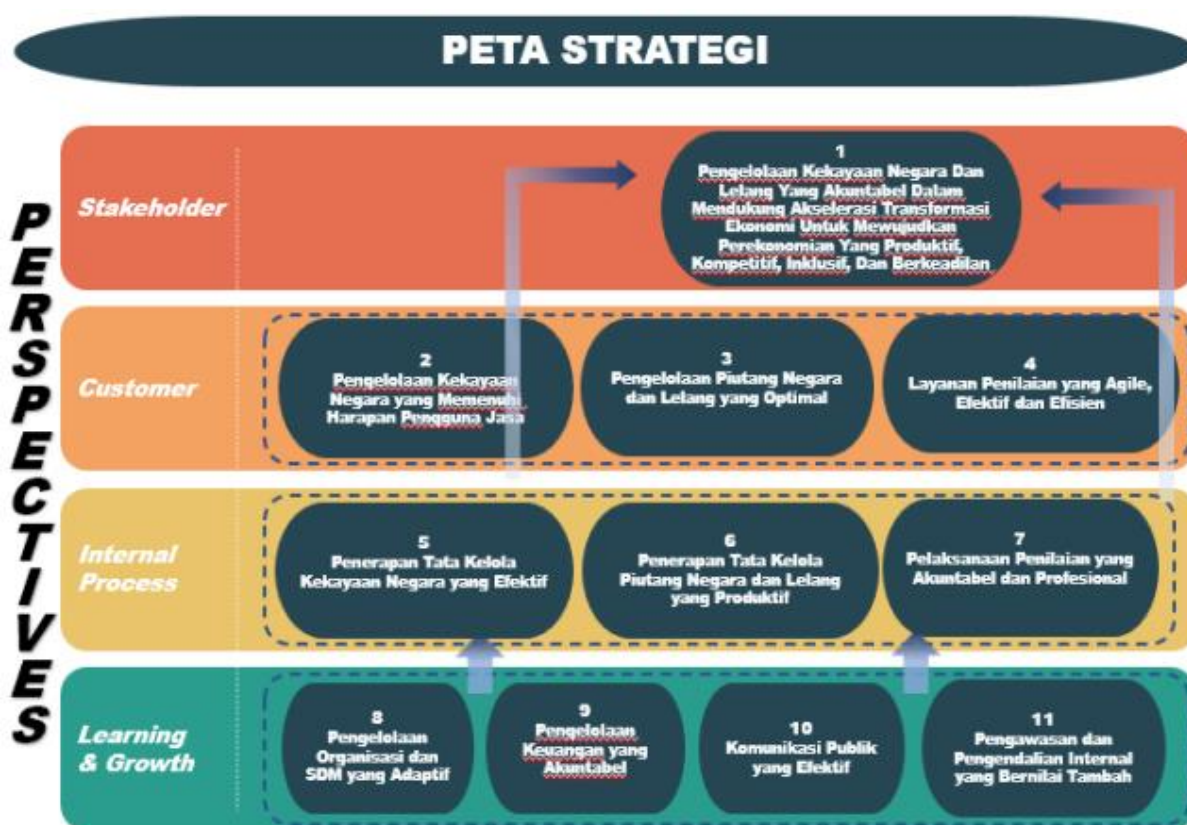
Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi

tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Palopo. Sasaran Strategis KPKNL Palopo Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palopo.

Peta Strategi KPKNL Palopo menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders' perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders' perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Peta Strategi KPKNL Palopo Tahun 2024 memuat 11 sasaran strategis sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Perjanjian kinerja pada KPKNL Palopo menetapkan Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur atas sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, KPKNL Palopo menetapkan 20 (dua puluh) IKU yang merupakan penjabaran dari 11 (sebelas) sasaran strategis Kemenkeu *Three* KPKNL tahun 2024 sesuai



Perjajian Kinerja di lingkup KPKNL Palopo nomor PK-4/WKN.15/2024 tanggal 30 Januari 2024. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%
4.	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75%
5.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6.	Penerapan tata Kelola Piutang negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	85%
		6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8.		8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%



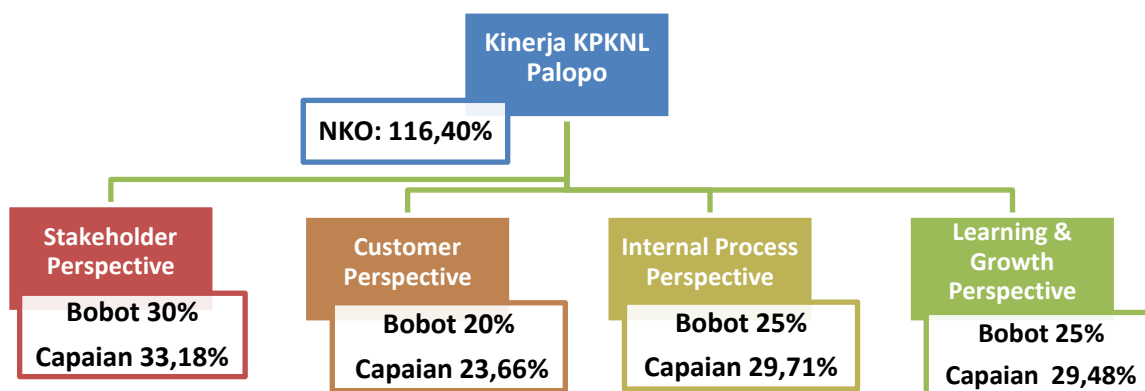
	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85%
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pengelolaan Anggaran	100%
		9b-CP	Pesentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%
		9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%
10.	Komunikasi publik yang efektif	10b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80%
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82%
		11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI/WBK	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi KPKNL Palopo tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada tiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Nomor KEP-32/WKN.15/2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat Tahun 2024 bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo tahun 2024 adalah sebesar 116,40 %. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada tiap perspektif sebagai berikut:



Berikut kami tampilkan tabel capaian IKU KPKNL Palopo tahun 2024:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Tanpa Batas	Max 120%
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>						33,18%
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	130,39%	130,39%	120%
		Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%	103,67%



<i>Customer Perspective (20%)</i>						23,66%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	87,47%	122,34%	120%
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	96,67%	111,75%	111,75%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100%	116,80%	116,80%	116,80%
		Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	267,27%	267,27%	120%
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75%	120%	160%	120%
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>						29,71%
5.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	131,87%	131,87%	120%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	121,16%	121,16%	120%
6.	Penerapan tata Kelola Piutang negara dan Lelang yang produktif	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	100%	120%	120%	120%
		Persentase produktivitas lelang	89%	100,68%	113,12%	113,12%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang	Persentase Deviasi	16%	0	200%	120%



	Akuntabel dan Profesional	Ketergunaan Hasil Penilaian				
<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>						29,48%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	119%	132,22%	120%
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85%	90,81%	106,834 %	120%
9.	Pengelolaan keuangan akuntabel yang	Indeks Kinerja Kualitas Pengelolaan Anggaran	100	120	120%	120%
		Pesentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0%	200%	120%
		Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%	120%	120%	120%
10.	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80%	100%	125%	120%
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	95,45	116,40%	116,40%
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI /WBK	100	120	120%	120%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Palopo Tahun 2024, diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Palopo sebagai berikut:



1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

IKU:

1a-CP- Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

a. PNBPKekayaan Negara (PNBP BMN).

- 1) penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- 2) penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan

b. PNBPPiutang Negara (PNBP PN).

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBPLelang.

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- 1) bea lelang,
- 2) bea lelang pegadaian,
- 3) denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- 4) biaya permohonan lelang,
- 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
- 6) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2024, kinerja penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diakui apabila nilai penerimaan atas PNBPKekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang telah masuk ke rekening kas negara sesuai mata anggaran penerimaan. Mata anggaran yang digunakan tersebut sesuai dengan Kepdirjen Perbendaharaan nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.



Capaian IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP- Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Po/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX /TLK
Realisasi	144,54%	136,26%	136,26%	117,66%	117,66%	130,39%	106,18%	
Capaian	144,54%	136,26%	136,26%	117,66%	117,66%	130,39%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	117,66%	117,66%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- berkoordinasi dan mendorong satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN terutama melalui pemanfaatan BMN yang belum digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi.
- berkoordinasi dan mendorong satker untuk mengajukan penghapusan BMN kondisi rusak berat melalui lelang penjualan BMN.
- berkoordinasi dengan KPPN terkait untuk mendapatkan data realisasi PNBPN aset pada Aplikasi OM SPAN.

Capaian penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut.

Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	Rp4.746.280.342	Rp3.374.521.822
2021	Rp3.419.008.679	Rp5.087.695.183
2022	Rp4.590.042.111	Rp4.873.519.708
2023	Rp5.455.040.267	Rp6.289.876.933
2024	Rp5.627.200.000	Rp7.337.330.091

2. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

IKU:

1b-CP- Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun



tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

Realisasi dari IKU ini merupakan realisasi secara nasional, yaitu sebesar 92,44% dari target 89,17%, sehingga perolehan IKU tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Namun demikian, KPKNL Palopo berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan dapat menyumbang kenaikan capaian indeks integritas secara nasional di tahun 2025 dari capaian tahun ini.

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Anti Korupsi di Internal dan Eksternal KPKNL Palopo;
- b. Survei SPI terdiri dari Internal: Pegawai KPKNL Palopo, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel dan Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan KPKNL Palopo, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
- c. Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang terdiri dari Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi III sampai dengan penyampaian Laporan Narasi (PPG) Tahunan pada KPKNL Palopo

Capaian IKU indeks integritas adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1b-CP- Indeks Integritas							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target		20	20	30	30	89,17	89,17	Max/ TLK
Realisasi		20	20	30	30	92,44	92,44	
Capaian		100%	100%	100%	123,71%	103,67%	103,67%	
Nilai Kinerja		100%	100%	100%	120%	103,67%	103,67%	



3. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

IKU :

2a-CP- Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Komponen kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK terdiri dari:

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2024 yaitu pengukuran tingkat penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara. Kesesuaian tersebut termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sesuai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.
- b. Optimalisasi Objek Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2024 yaitu melakukan pengukuran tingkat optimalisasi terhadap BMN Objek Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2024.

Capaian IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP- Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/ KP
Target		50%	50%	68%	68%	71,5%	71,5%	MAX /TLK
Realisasi		177,51%	177,51%	157,71%	157,71%	87,47%	87,47%	
Capaian		355,01%	355,01%	231,92%	231,92%	122,34%	120%	
Nilai Kinerja		120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan bimtek untuk satker terkait dengan pelaksanaan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, baik melalui media daring maupun luring.
2. Melakukan asistensi kepada satker dalam pelaksanaan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
3. Mendorong satker untuk segera menyelesaikan pengisian formulir pendataan SBSK dan menyampaikannya ke KPKNL.
4. Koordinasi dengan satker target terkait pengisian dan verifikasi formulir pendataan satker.



4. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

IKU:

2b-CP- Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP- Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Po/ KP
Target	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%	MAX /TLK
Realisasi	73,91%	80%	80%	93,33%	93,33%	96,67%	96,67%	
Capaian	85,45%	177,78%	177,78%	155,56%	155,56%	111,75%	111,75%	
Nilai Kinerja	85,45%	120%	120%	120%	120%	111,75%	111,75%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. selalu mengingatkan kepada satker yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN, baik pemindahtanganan maupun pemanfaatan, untuk segera meindaklanjuti persetujuan tersebut sebelum jangka waktu persetujuan lewat waktu (daluarsa), baik secara formal melalui surat maupun secara informal.
- b. Membuat database rekapitulasi persetujuan pengelolaan BMN dan tindak lanjut yang telah satker lakukan antara lain berupa permohonan lelang untuk penjualan BMN, bukti setor PNPB sewa dan perjanjian sewa aset untuk pemanfaatan BMN.

Capaian Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut.

Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	80%	97%
2021	85%	96%
2022	85%	93%
2023	86%	98%
2024	86,5%	96,67%



5. Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal

IKU:

3a-CP- Persentase realisasi pokok lelang

Persentase pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu

Capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
	3a-CP- Persentase realisasi pokok lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX /TLK
Realisasi	87,39%	115,71%	115,71%	99,69%	99,69%	116,80%	116,80%	
Capaian	87,39%	115,71%	115,71%	99,69%	99,69%	116,80%	116,80%	
Nilai Kinerja	87,39%	115,71%	115,71%	99,69%	99,69%	116,80%	116,80%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi terkait permohonan lelang online;
- Melakukan penggalian potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pemerintah daerah, dan satker di lingkungan KPKNL Palopo.

Capaian persentase realisasi pokok lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut.

Realisasi Pokok Lelang		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	Rp 73.710.000.000	Rp 67.524.349.619
2021	Rp 70.000.000.000	Rp 142.129.640.255
2022	Rp 87.000.000.000	Rp 105.334.056.964
2023	Rp 110.687.000.000	Rp 126.943.641.893
2023	Rp 110.800.000.000	Rp 129.412.084.150



6. Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal

IKU :

3b-CP- Persentase penurunan *outstanding* Piutang Negara

Kriteria pengakuan capaian atas IKU Persentase penurunan *outstanding* Piutang Negara adalah sebagai berikut:

- Penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT), berupa angsuran dan pelunasan;
- Penjumlahan piutang yang diselesaikan melalui penarikan/pengembalian dan penerbitan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); serta
- Keringanan hutang terhadap BKPN yang lunas pada tahun berjalan.

Capaian IKU Persentase penurunan *outstanding* Piutang Negara adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
	3b-CP- Persentase penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX /TLK
Realisasi	131,75%	443,65%	443,65%	215,39%	215,39%	267,27%	267,27%	
Capaian	131,75%	443,65%	443,65%	215,39%	215,39%	267,27%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- mensosialisasikan secara masif terkait adanya *crash program* piutang Negara melalui berbagai sarana.
- melakukan kegiatan penagihan langsung kepada debitur.
- melakukan koordinasi dalam rangka konsolidasi data dan dokumen dengan penyerah piutang.

Capaian Persentase penurunan *outstanding* Piutang Negara dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut.

Penurunan Outstanding Piutang Negara		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	Rp45.000.000	Rp61.380.421
2021	Rp51.538.654	Rp356.433.551
2022	Rp37.150.000	Rp74.551.976
2023	Rp117.200.000	Rp122.119.754
2024	Rp138.000.000	Rp368.830.484



7. Sasaran Strategis 4: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

IKU :

4a-CP- Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup pelayanan penilaian yang diukur adalah pelayanan penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD).

Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian adalah sebagai berikut:

K-Wide	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	4a-CP- Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	MIN/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	160%	160%	160%	160%	160%	160%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan proses pelayanan penilaian BMN sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pembinaan kepada satker terkait prosedur pelayanan penilaian di KPKNL Palopo

8. Sasaran Strategis 5: Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif

IKU :

5a-CP- Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa Tanah tahun 2024 terdiri atas 4 kategori, yaitu:

- Target K1 (*Clean and Clear*) sejumlah 11 bidang tanah;
- Target K2 (*Not Clean but Clear*) sejumlah 302 bidang tanah;
- Target K3 (*Clean but Not Clear* dan *Not Clean and Not Clear*) sejumlah 164 bidang tanah;
- Target K4 (*Update* dan *Validasi Data*) sejumlah 0 bidang tanah.



Sementara tahapan dalam pelaksanaan IKU sertifikasi BMN adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah pada K/L dengan aplikasi SIMAN;
- b. Verifikasi hasil identifikasi dan pendataan BMN terhadap seluruh bidang tanah baik yang telah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat;
- c. Melakukan konfirmasi kepada K/L mengenai status dan kondisi BMN berupa tanah yang belum bersertipikat, sebagai bahan untuk menentukan kategori target;
- d. Penyusunan dan pengelompokan data BMN belum bersertifikat berdasarkan hasil konfirmasi status bidang tanah dari K/L;
- e. Melakukan koordinasi dengan K/L dan BPN;
- f. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi BMN dan mengajukan permohonan kepada BPN untuk disertifikatkan sesuai ketentuan;
- g. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan;
- h. K/L melakukan update data pada SIMAN;
- i. KPKNL dan Kanwil melakukan validasi pada SIMAN/Valserah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Target K1 (*Clean and Clear*): Sertipikat Hak Pakai, update pada SIMAN, dan validasi pada Valserah.
- b. Target K2 (*Not Clean but Clear* atau *Not Clean and Not Clear*): Peta Bidang Tanah (BPT) dan upload PBT pada SIMAN.
- c. Target K3 (*Clean but Not Clear*): input pada Sentuh Tanahku, Pemblokiran, atau produk lain dalam rangka pengamanan BMN.
- d. Target K4 (*Update dan Validasi Data*): update data SIMAN dan validasi di Valserah.

Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
	5a-CP- Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Po/ KP
Target		40%	40%	40%	40%	100%	100%	MAX /TLK
Realisasi		44,86%	44,86%	62,05%	62,05%	131,87%	131,87%	
Capaian		112,16%	112,16%	155,14%	155,14%	131,87%	120%	
Nilai Kinerja		112,16%	112,16%	120%	120%	120%	120%	



Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara intens dengan kantor-kantor pertanahan terkait yang berada dalam wilayah kerja KPKNL Palopo
- b. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi tanah secara rutin dengan pihak kantor pertanahan dan satker

Capaian Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut.

Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	106	106
2021	442	507
2022	55	194
2023	730	948
2024	477	629

9. Sasaran Strategis 5: Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif

IKU :

5b-CP- Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
	5b-CP- Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	MAX /TLK
Realisasi	10,13%	53,32%	53,32%	117,50%	117,50%	121,16%	121,16%	
Capaian	101,27%	166,61%	166,61%	146,88%	146,88%	121,16%	120%	
Nilai Kinerja	101,27%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	



Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan terhadap satker yang BMN nya menjadi target pengukuran evaluasi kinerja BMN.
- b. melakukan asistensi/pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan.
- c. Melakukan survey lapangan dalam rangka pengukuran evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

10. Sasaran Strategis 6: Penerapan tata Kelola Piutang negara dan Lelang yang produktif

IKU :

6a-CP- Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle), adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBPN (*revenue generating*), tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum), adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. serta aset tertib administrasi, fisik dan hukum.

Capaian IKU Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata Kelola Piutang negara dan Lelang yang produktif							
	6a-CP- Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Po/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	MIN/ TLK
Realisasi	100%	108,33%	108,33%	100%	100%	120%	120%	
Capaian	100%	108,33%	108,33%	100%	100%	120%	120%	
Nilai Kinerja	100%	108,33%	108,33%	100%	100%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mensosialisasikan secara massif terkait adanya crash program piutang Negara melalui berbagai sarana.



- b. melakukan koordinasi dalam rangka konsolidasi data dan dokumen dengan penyerah piutang.
- c. melakukan kegiatan penagihan langsung kepada debitur.

11. Sasaran Strategis 6: Penerapan tata Kelola Piutang negara dan Lelang yang produktif

IKU :

6b-CP- Persentase produktivitas lelang IKU

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Capaian IKU Persentase produktivitas lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan tata Kelola Piutang negara dan Lelang yang produktif							
	6b-CP- Persentase produktivitas lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Po/ KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	MAX /TLK
Realisasi	121,35%	70,18%	70,18%	90,5%	90,5%	100,68%	100,68%	
Capaian	404,49%	155,97%	155,97%	150,08%	150,08%	113,12%	113,12%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	113,12%	113,12%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan calon pemohon lelang agar pemohon lelang memprioritaskan untuk mengajukan objek lelang yang *marketable*.
- b. Melakukan penyampaian informasi pengumuman lelang kepada masyarakat agar mengikuti lelang melalui berbagai saluran media informasi termasuk media sosial.
- c. Membuat database nilai wajar BMN dan harga lelang BMN tersebut agar hasil penilaian yang dijadikan dasar persetujuan penjualan BMN dapat mencerminkan nilai wajar/pasar yang sebenarnya.



Capaian Persentase produktivitas lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut.

Persentase Produktivitas Lelang		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	34%	36%
2021	35%	37%
2022	36%	56%
2023	80%	105%
2024	89%	100,68%

12. Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

IKU :

7a-CP- Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Target Deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2024 adalah 16%.



Capaian IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	7a-CP- Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Po/ KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	MIN/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan proses penilaian BMN sesuai dengan standar dan ketentuan penilaian;
- Melakukan pembinaan kepada satker terkait usulan nilai taksiran harga yang dijadikan usulan dalam rangka permohonan penghapusan BMN dan pemanfaatan BMN.

Capaian Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut.

Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	30%	0%
2021	22%	0,23%
2022	19%	0%
2023	25%	0%
2024	16%	0%

13. Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU :

8a-N- Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan *Individual Development Plan* atau perencanaan pengembangan setiap pegawai.



Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8a-N- Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/K P
Target	45%	45%	45%	75%	75%	90%	90%	MAX/ TLK
Realisasi	0%	82,50%	82,50%	82,50%	82,50%	119%	119%	
Capaian	0%	183,33%	183,33%	110%	110%	132,22%	132,22%	
Nilai Kinerja	0%	120%	120%	110%	110%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Membuat *database* terkait rekapitulasi data diklat/klc yang telah diikuti oleh para pegawai;
- Selalu mengingatkan kepada para pegawai untuk mengisi usulan diklat salah satunya pada saat dilakukan DKI;
- Selalu mendorong pegawai untuk mengikuti diklat/klc dalam rangka pengembangan kompetensi masing-masing pegawai.

Capaian Persentase pengembangan kompetensi pegawai dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut.

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	100%	120%
2021	100%	120%
2022	100%	120%
2023	84%	120%
2024	90%	119%

14. Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU :

8b-N- Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko IKU

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas



implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi.

Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko adalah:

K-Wide	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8b-N- Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	MAX /TLK
Realisasi	100%	111,09%	111,09%	114,42%	114,42%	90,81%	90,81%	
Capaian	117,65%	130,70%	130,70%	134,62%	134,62%	106,834%	106,83%	
Nilai Kinerja	117,65%	120%	120%	120%	120%	106,834%	106,83%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perencanaan: penyampaian dokumen berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, Rencana Kerja Anggaran / POK, Dokumentasi Resource Forum Perencanaan Output Kinerja dan Anggaran, dan Dokumentasi Refinement Penyusunan Peta Strategi, IKU dan Target IKU 2024.
- b. Pelaksanaan/Eksekusi: penyampaian dokumen berupa Perjanjian Kinerja Pemilik Peta, Manual IKU Pemilik Peta, Dokumen Manual IKU sebagai output dari Aplikasi, Matriks Cascading Kepala Kantor, Dokumentasi Agenda Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pemilik Peta, dan Manual IKU atas Perjanjian Pemilik Peta (Kepala KPN Palopo)



- c. Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi terdiri dari kegiatan pengembangan kapasitas Pengelola Kinerja Organisasi, Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tahun 2024, dan Efektivitas Pelaksanaan Edukasi Pengelolaan Kinerja Organisasi
- d. Monev secara mandiri yang direviu oleh Kanwil untuk dokumen periode Triwulan 3 dan 4 2023 serta Triwulan 1 dan 2 2024 yang terdiri dari Laporan Kinerja, Dokumentasi Kegiatan DKO, SK NKO 2024, Dokumentasi Pendukung Capaian IKU Sampel, dan Rencana Aksi yang ditetapkan pada Triwulan III 2023 dan Triwulan I 2024
- e. Penyusunan Profil dan Piagam Risiko terdiri dari Profil Risiko, Piagam Risiko dan Dokumen Lainnya
- f. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III 2024 dan Kegiatan pendukung lainnya berupa Edukasi Manajemen Risiko dan Pegawai yang mengikuti diklat risiko.

15. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU

9a-CP- Indeks Kinerja Kualitas Pengelolaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Target IKU ini untuk tahun 2024 adalah 100%.

Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	9a-CP- Indeks Kinerja Kualitas Pengelolaan Anggaran							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX /TLK
Realisasi	120%	9560%	9560%	10526%	10526%	120%	120%	
Capaian	120%	9560%	9560%	10526%	10526%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	



Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat rencana penarikan dana dan rencana kegiatan dengan cermat.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran dan capaian output secara rutin.
- c. Melakukan monitoring capaian IKPA pada aplikasi OM SPAN.
- d. Melakukan koordinasi dengan KPPN Palopo terkait progres capaian IKPA

Capaian Indeks Kinerja Kualitas Pengelolaan Anggaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	95%	95%
2021	95%	94%
2022	96%	92%
2023	100%	100%
2024	100%	120%

16. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU

9b-CP- Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP: 425782 dan 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Target Deviasi PNBP dari Pengurusan Piutang dan Deviasi PNBP dari Bea Lelang masing-masing adalah 10%.



Capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	9b-CP- Pesentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Po/ KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	MAX /TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah membuat dan menggunakan aplikasi internal (SIKASIH) dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sederhana berbasis *google spreadsheet*, yang berfungsi mempermudah proses koordinasi dan rekonsiliasi antara tugas bendahara penerima yang manatausahakan rekening penampungan, dengan pendapatan PNBP dari lelang dan pengurusan piutang negara yang dilakukan pencatatan pada Subbagian Umum.

Capaian Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2021	12,50%	0%
2022	10%	0%
2023	15%	0%
2024	10%	0%

17. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU

9c-N- Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

IKU Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan bertujuan untuk mengukur kualitas pengelolaan BMN eksisting pada unit kerja dan mengukur kualitas pengadaan BMN pada unit kerja. Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan BMN berfokus pada 2 komponen penilaian yaitu pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. Kualitas pengelolaan BMN diukur dari Indeks Pengelolaan Aset (IPA), yang terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan



persentase BMN yang memiliki dokumen kepemilikan; serta Persentase Validitas dan Completeness Master Aset.

Tingkat kualitas pengadaan BMN berfokus pada pencapaian ITKP yang diukur oleh LKPP. Target IKU Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tahun 2024 adalah 100%.

Capaian IKU Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	9c-N- Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Po/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX /TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL Palopo berupaya untuk menjaga kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan senantiasa melaksanakan pengelolaan dan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas manfaat, efektif dan efisien serta memperhatikan prinsip dalam pengadaan yaitu tepat waktu, tepat guna dan tepat hasil.

18. Sasaran Strategis 10: Komunikasi publik yang efektif

IKU

10a-N- Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Dalam IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID), KPKNL selaku PPID Tingkat III memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, petugas layanan informasi publik pada KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.



Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	10a-N- Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	MAX /TLK
Realisasi	110%	110%	110%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	137,50%	137,50%	137,50%	125%	125%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian IKU tersebut, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan informasi publik apabila terdapat permintaan informasi publik dari pengguna layanan dengan tepat waktu
- b. Menyampaikan laporan informasi publik kepada PPID Tingkat II dengan tepat waktu
- c. Membuat dan menyampaikan surat penunjukan petugas layanan informasi publik dengan tepat waktu.

19. Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah IKU

11a-N- Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Tujuan IKU ini untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian IKU ini berdasarkan penilaian mandiri yang direviu oleh kanwil atas 11 kegiatan efektivitas UKI di mana terdapat 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat (jika ada),
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI (jika ada)



10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Capaian IKU Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11a-N- Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Po/ KP
Target						82	82	MAX /TLK
Realisasi						95,45	95,45	
Capaian						116,40%	116,40%	
Nilai Kinerja						120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Komitmen Pimpinan, di mana pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dalam proses perencanaan tugas UKI, memberikan dukungan secara aktif terhadap pelaksanaan tugas UKI, dan melakukan evaluasi dan memberikan arahan serta masukan atas pelaksanaan tugas UKI.
- b. Dukungan Sumber Daya Manusia di mana Pejabat UKI (Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana UKI telah mendapatkan pembelajaran sesuai ketentuan, Pelaksana UKI telah diisi sesuai ABK atau standar lainnya, Kualifikasi Pelaksana UKI sesuai dengan ketentuan
- c. Akses Data dan Informasi dengan memanfaatkan akses ke aplikasi terkait proses bisnis yang dipantau, dalam kegiatan pemantauan
- d. UKI mengkomunikasikan rencana pemantauan tahunan kepada manajemen operasional, UKI berpartisipasi aktif dalam forum strategis unit kerja yang dihadiri oleh pimpinan unit kerja, berkomunikasi secara intensif dengan UKI tingkat atasnya/Itjen dalam rangka Pelaksanaan Tugas
- e. Komponen Proses Bisnis dengan melaksanakan Pemantauan *Fraud Risk Scenario* (FRS), Penyusunan Profil Pegawai, Penyusunan Program Kerja, Pelaksanaan Pemantauan Intern, Penarikan Simpulan Efektivitas Pengendalian Intern, dan Pelaporan Pemantauan Pengendalian Intern.
- f. Selanjutnya komponen hasil dengan menyajikan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dan Kejadian Tangkap Tangan dan/atau Kasus Korupsi (jika ada)



20. Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah IKU

11b-N- Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI /WBK

Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) adalah predikat yang diberikan pada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Tujuan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

KPKNL Palopo berhasil meraih predikat sebagai ZI-WBK (zona integritas, wilayah bebas dari korupsi) pada tahun 2022. Pada tahun 2024 KPKNL Palopo berkomitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan ZI WBK, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Pencapaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI /WBK sebesar 120% dari target 100%. Pencapaian tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan Field Evaluation dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan ZI-WBK pada KPKNL Palopo Tahun 2024 oleh Tim Penilai Eselon I DJKN dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kinerja yang memuaskan
 - 1) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2023 sebesar 114,13% naik dibandingkan NKO tahun 2022 yang berada di angka 113,53%.
 - 2) Dalam upaya menjaga keberlangsungan program WBK, KPKNL Palopo juga menunjukkan keseriusan dan kinerja yang baik, antara lain dengan penciptaan beberapa inovasi antara lain:
 - a) Percepatan Waktu Penyelesaian Layanan;
 - b) Aplikasi E-BURAS (Electronic Booth of Customer Automation Service);
 - c) Aplikasi Lacak Layanan;
 - d) Inovasi LONTARA (Lensa Opini tentang Aset Negara);
 - e) Inovasi PALOPO Experiment (Pengarusutamaan Akhlak untuk Layanan Optimal dan Otentik);
 - f) Inovasi Kebijakan Towards Green Office; dan
 - g) Kegiatan Kapurung (Kamis Pagi Upgrade Pengetahuan).
 - 3) Capaian prestasi yang didapatkan KPKNL Palopo selama periode tahun 2022 hingga triwulan II 2024 antara lain:



- a) Penghargaan atas Capaian PNBP Lelang Tertinggi Lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Tahun 2023; dan
 - b) Juara II Sosialisasi dan Edukasi (SOLID) Lelang Terbaik Lingkup DJKN Tahun 2024 Kategori KPKNL.
- 4) Salah satu kontribusi yang diberikan oleh KPKNL Palopo adalah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan *stakeholder* sehingga menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kolaborasi tersebut berupa pemberdayaan UMKM baik melalui kegiatan lelang dan pemasaran produk UMKM melalui portal lelang.

b. Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Unit Eselon I (TP UE I), diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Sesuai penelitian dan verifikasi dokumen yang diunggah pada Aplikasi Digital Integrity Assessment (DIA) Kementerian Keuangan, KPKNL Palopo telah mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada Aplikasi DIA. Namun berdasarkan hasil verifikasi TP UE I, masih terdapat beberapa dokumen yang belum lengkap dan/atau kurang sesuai;
- 2) Berdasarkan hasil kegiatan diskusi dan tanya jawab kepada Pimpinan Unit Kerja dan anggota Tim Kerja Keberlanjutan ZI-WBK, diperoleh hasil bahwa anggota Tim Kerja bisa menjelaskan dengan baik *progress* keberlanjutan program ZI-WBK pada KPKNL Palopo, termasuk juga tentang capaian kinerja, kontribusi, prestasi, inovasi, langkah-langkah yang diambil pimpinan unit kerja sebagai role model dalam penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan;
- 3) Berdasarkan hasil *office tour* yang dilakukan, sarana & prasarana terkait layanan kepada pengguna layanan sudah lengkap dan sudah mengakomodir kebutuhan pengguna jasa dari kelompok rentan (disabilitas, anak-anak, ibu hamil/menyusui dan lansia).



Capaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI /WBK adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11b-N- Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI /WBK							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target						100	100	MAX /TLK
Realisasi						120%	120%	
Capaian						120%	120%	
Nilai Kinerja						120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melaksanakan beberapa langkah antara lain:

- 1) Membuat SK Tim Kerja keberlanjutan ZI-WBK
- 2) Menyusun Rencana Kerja Tim keberlanjutan ZI-WBK
- 3) Menyusun Rencana Kerja Target Prioritas ZI-WBK
- 4) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kerja Agen Perubahan
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi keberlanjutan ZI-WBK setiap bulan

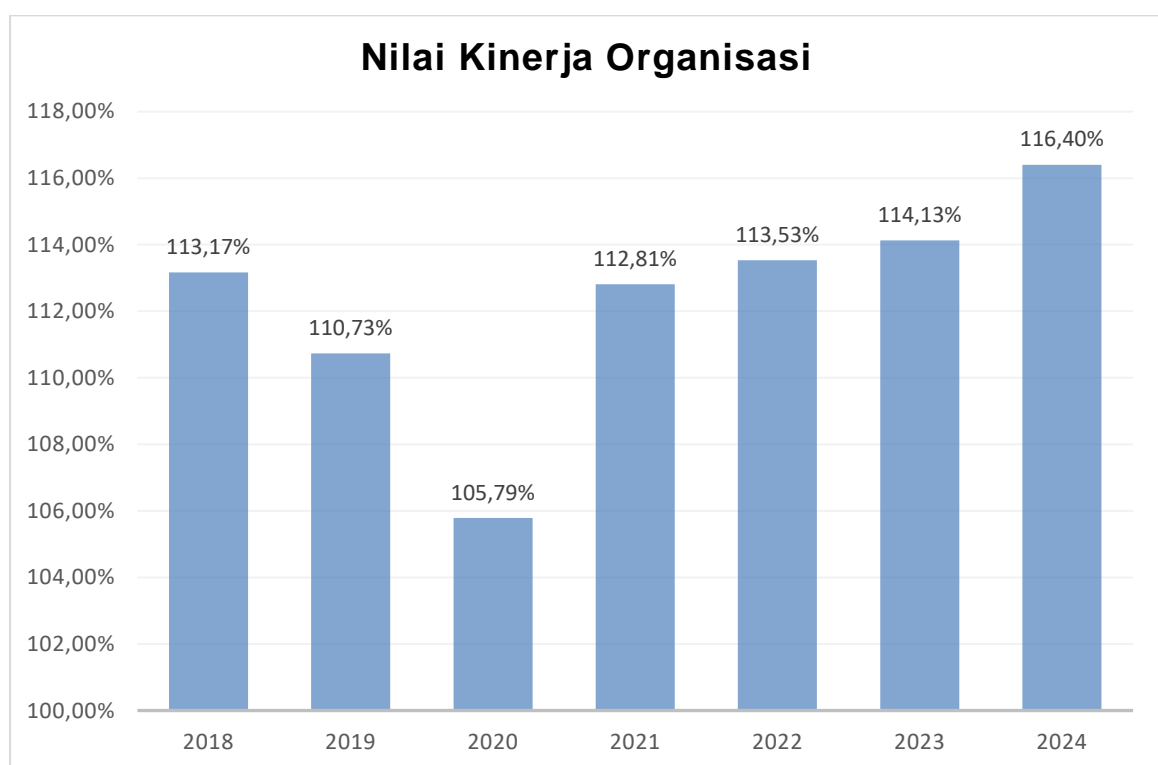


Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (selanjutnya disingkat “NKO”) adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil bahwa capaian NKO KPKNL Palopo tahun 2024 adalah sebesar **116,40%**.

NKO pada tahun 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini diakibatkan terjadinya pandemi Covid-19 yang juga berimbas pada beberapa IKU sehingga mempengaruhi nilai akhir NKO. Pada tahun 2021 NKO KPKNL Palopo mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan NKO pada tahun 2020. Tren tersebut berlanjut pada tahun 2022 s.d. 2024 dengan capaian NKO yang kembali mengalami kenaikan. Capaian NKO pada tahun 2024 merupakan nilai tertinggi yang berhasil dicapai dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir

Berikut capaian NKO KPKNL Palopo dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.





ANALISIS KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

A. Capaian Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Keberhasilan dalam memenuhi target PNPB dan sertifikasi dicapai karena kerja keras dalam:

- a. Melakukan identifikasi potensi-potensi PNPB dari pemanfaatan dan/atau penjualan BMN serta penjualan barang rampasan
- b. Melakukan monitoring tindak lanjut pengelolaan BMN;
- c. Melakukan koordinasi intensif dengan satker target sertifikasi dan BPN dalam upaya percepatan penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah;
- d. Optimalisasi target K4 dengan mendorong satker untuk melakukan penginputan data sertifikat pada SIMAN, yang selanjutnya divalidasi oleh KPKNL dan Kanwil.

2. Piutang Negara

Keberhasilan dalam memenuhi target kinerja di bidang pengurusan piutang negara dicapai karena kerja keras dalam:

- a. meneliti dan mempelajari kembali Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang berpotensi untuk dapat diselesaikan dengan kegiatan pemeriksaan berkas maupun *stock opname* bersama antara Seksi Piutang Negara dan Seksi Hukum dan Informasi;
- b. melakukan kegiatan penagihan kepada debitur baik secara langsung (dengan mendatangi kediaman) maupun tidak langsung (telepon/WhatsApp) dengan pendekatan persuasif.
- c. mensosialisasikan secara masif terkait adanya *crash program* piutang Negara melalui berbagai sarana (surat dan mendatangi langsung kepada debitur serta pemanfaatan media sosial).
- d. melakukan koordinasi dalam rangka konsolidasi data dan dokumen dengan penyerah piutang.

3. Lelang

KPKNL Palopo mencatatkan prestasi membanggakan dengan berhasil mencapai realisasi pokok lelang senilai Rp 23 M atau dengan presentasi sebesar 116,8% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata keseriusan dan kolaborasi dalam mengelola lelang negara serta menunjukkan dedikasi tinggi dari seluruh jajaran KPKNL, yang antara lain ditunjukkan dengan:



- a. Koordinasi dan komunikasi intens dengan industri perbankan/keuangan dan satker pemerintah dalam penggalian potensi lelang.
- b. Pelaksanaan lelang secara teliti dan prudent, meliputi kegiatan pra-lelang, lelang, dan pasca lelang, didukung juga dengan supervisi dan monitoring dari pimpinan dan unit kepatuhan.
- c. Pelayanan lelang yang tulus dan profesional, baik kepada pemohon/penjual lelang maupun kepada pembeli lelang misalnya dalam pelayanan pemberian salinan dan kutipan risalah lelang serta kuitansi pembayaran lelang.

B. Dukungan teknologi informasi/aplikasi di bidang pengelolaan kekayaan negara telah dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi *stakeholder*

Dukungan teknologi informasi dan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) secara umum, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) secara khusus, telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pengelolaan kekayaan negara. Beberapa aplikasi telah dikembangkan DJKN dalam rangka menyediakan pelayanan yang lebih optimal kepada *stakeholder*. Aplikasi tersebut antara lain Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2, Sistem Informasi Penilaian (SIP), dan lelang.go.id Gen 2.

KPKNL, sebagai unit vertikal di bawah DJKN, juga turut menghadirkan berbagai inovasi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan serta dalam rangka penyebaran informasi kepada publik. Beberapa inovasi tersebut yakni Lacak Layanan dan,-Buras.

Secara keseluruhan, dukungan teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh DJKN dan KPKNL tidak hanya memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap penyediaan layanan yang transparan, efisien, dan akuntabel.



RENCANA KERJA KPKNL PALOPO 2025

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, target yang diharapkan dapat dicapai tahun 2025 serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, dan kebutuhan dan harapan pengguna layanan, KPKNL Palopo memiliki rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut:

A. Peningkatan kualitas pelayanan di bidang PKN, Piutang Negara, Lelang

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

- a. Mengintensifkan edukasi kepada satker terkait dengan pelaksanaan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK serta terkait implementasi portofolio aset, baik melalui media daring maupun luring.
- b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif, termasuk dalam hal mendorong satker untuk optimalisasi penggunaan aset, maupun melalui pemanfaatan aset.
- c. Percepatan sertifikasi BMN, dengan melakukan pendampingan kepada satker, dari awal tahap proses sertifikasi hingga proses selesai, serta mengintensifkan komunikasi dalam rangka koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
- d. Meningkatkan pemahaman peraturan baik di internal maupun eksternal melalui internalisasi kepada pegawai dan sosialisai kepada stakeholder

2. Optimalisasi pengurusan piutang negara

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan penyerah piutang, terkait dengan adanya kendala dalam proses pengurusan piutang atas BKPN yang ada.
- b. Melakukan penggalan potensi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan penyerah piutang lainnya.
- c. Memaksimalkan proses penagihan dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif.
- d. Mensosialisasikan secara massif mengenai adanya *crash program* piutang negara tahun 2025 melalui berbagai kanal media.

3. Peningkatan pelayanan lelang

- a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Palopo antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun non eksekusi. Guna mendukung strategi tersebut akan dilakukan :
 - 1) Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggalan potensi lelang untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna layanan.



- 2) Pembuatan Database Pelaksanaan Lelang dan pemeliharaan data yang berkelanjutan di wilayah kerja KPKNL Palopo.
- b. Sosialisasi penggunaan dan pelaksanaan lelang melalui www.lelang.go.id kepada *stakeholder* melalui saluran-saluran media yang tersedia.

B. Menghadirkan inovasi pelayanan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada organisasi dan berorientasi terhadap peningkatan layanan kepada publik

KPKNL Palopo selalu berupaya untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada publik, dengan tujuan memberikan dampak positif baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Inovasi yang dikembangkan oleh KPKNL berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pengelolaan kekayaan negara, dan transparansi dalam berbagai proses lelang dan pengelolaan aset negara.

Beberapa inovasi yang sedang dilakukan pengembangan antara lain yaitu APSARA (APT Santun dan Ramah), KOWALA (Kolaborasi Whatsapp Layanan), TIMER (Total dan Ikhlas Melayani stakeholder), ILALANG (Inovasi Layanan Lelang), *Re-engineering* e-Buras, PELIKAN (Penyediaan Layanan Informasi etiKa dan ANTikorupsi), serta program CSR.

Inovasi yang dikembangkan oleh KPKNL tidak hanya berorientasi pada peningkatan internal organisasi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, dengan memberikan berbagai kemudahan serta memastikan proses bisnis berjalan dengan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

C. Pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas seluruh pegawai

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas seluruh pegawai merupakan langkah strategis untuk menciptakan organisasi yang tangguh, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan keterampilan teknis hingga penguatan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja dalam tim.



Melalui Rapat Kerja KPKNL Palopo yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 13 Januari 2025, telah dirumuskan beberapa program pengembangan pegawai. Program-program tersebut berkaitan dengan habituasi budaya Kementerian Keuangan, implementasi *Learning Organization*, rencana aksi pembelajaran, serta pengelolaan kinerja pegawai.

D. Sarana dan prasarana

Fokus utama lainnya dalam pengembangan sarana dan prasarana adalah membenahan fasilitas fisik pada KPKNL Palopo yang dapat menunjang kenyamanan baik pengguna layanan maupun para pegawai. Selain itu, upaya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman bagi seluruh pihak juga bertujuan untuk menunjang kinerja dan pelayanan pegawai kepada pengguna layanan.

Peningkatan sarana dan prasarana juga mencakup pengadaan fasilitas yang ramah inklusif bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus. Penyediaan fasilitas seperti *guiding block*, akses untuk disabilitas, serta ruang layanan yang mudah diakses oleh semua pihak. Selanjutnya, KPKNL Palopo juga berencana untuk menyediakan fasilitas kanopi parkir bagi pengguna layanan, fasilitas ruang baca di Area Pelayanan Terpadu (APT), serta penambahan mural pada dinding kantor.

E. Konsisten melanjutkan pembangunan Zona Integritas WBK sekaligus mempersiapkan diri untuk menuju ZI Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2025

Beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

- a. Konsisten menerapkan pola pikir dan budaya kerja yang bebas dari korupsi, dengan mengutamakan prinsip pelayanan berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh segenap jajaran pegawai ASN di lingkungan KPKNL Palopo, baik ASN PNS maupun non PNS.
- b. Melakukan publikasi yang optimal mengenai pembentukan zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani KPKNL Palopo kepada stakeholder melalui berbagai media informasi baik cetak, melalui spanduk/pamflet maupun secara elektronik, misalnya melalui media social.
- c. Inovasi atas layanan unggulan kepada *stakeholder*, baik inovasi berupa pemangkasan waktu layanan, maupun inovasi program berbasis kegiatan, atau berbasis penggunaan media aplikasi.



- d. Membuka layanan pengaduan atau kotak saran dan masukan atas kinerja KPKNL Palopo baik secara fisik, maupun melalui media elektronik.
- e. Menjalin *engagement* yang lebih erat dengan stakeholder pengguna layanan melalui berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan, baik secara *online* maupun *offline*.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan diarahkan pada efisiensi pengeluaran dan penggunaan dana seoptimal mungkin. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan 31 Desember 2024 terhitung realisasi belanja unit KPKNL Palopo pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp 1,414,186,030** atau **94,49%** dari total pagu revisi dalam DIPA KPKNL Palopo sebesar **Rp 1,496,611,000**.

Realisasi penggunaan anggaran DIPA tahun 2023 secara terperinci adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Pagu setelah Revisi	Realisasi
Jumlah Seluruhnya	Rp 1,475,541,000	Rp 1,413,161,998
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 291,896,000	Rp 265,017,894
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 10,746,000	Rp 7,714,400
2. Pengelolaan Aset	Rp 281,150,000	Rp 257,303,494
Dukungan Manajemen	Rp 1,183,645,000	Rp 1,148,144,104
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 21,888,000	Rp 21,358,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1,141,276,000	Rp 1,111,329,604
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 10,177,000	Rp 7,848,500
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 10,304,000	Rp 7,608,000



BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan, mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palopo serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2020-2024.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palopo pada tahun 2024 secara umum dapat dikatakan baik, dan dari target 20 IKU yang telah ditetapkan, hampir secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan NKO sebesar **116,40%**.

Pencapaian ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Palopo untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya KPKNL Palopo untuk mempersiapkan diri menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk tahun 2025.

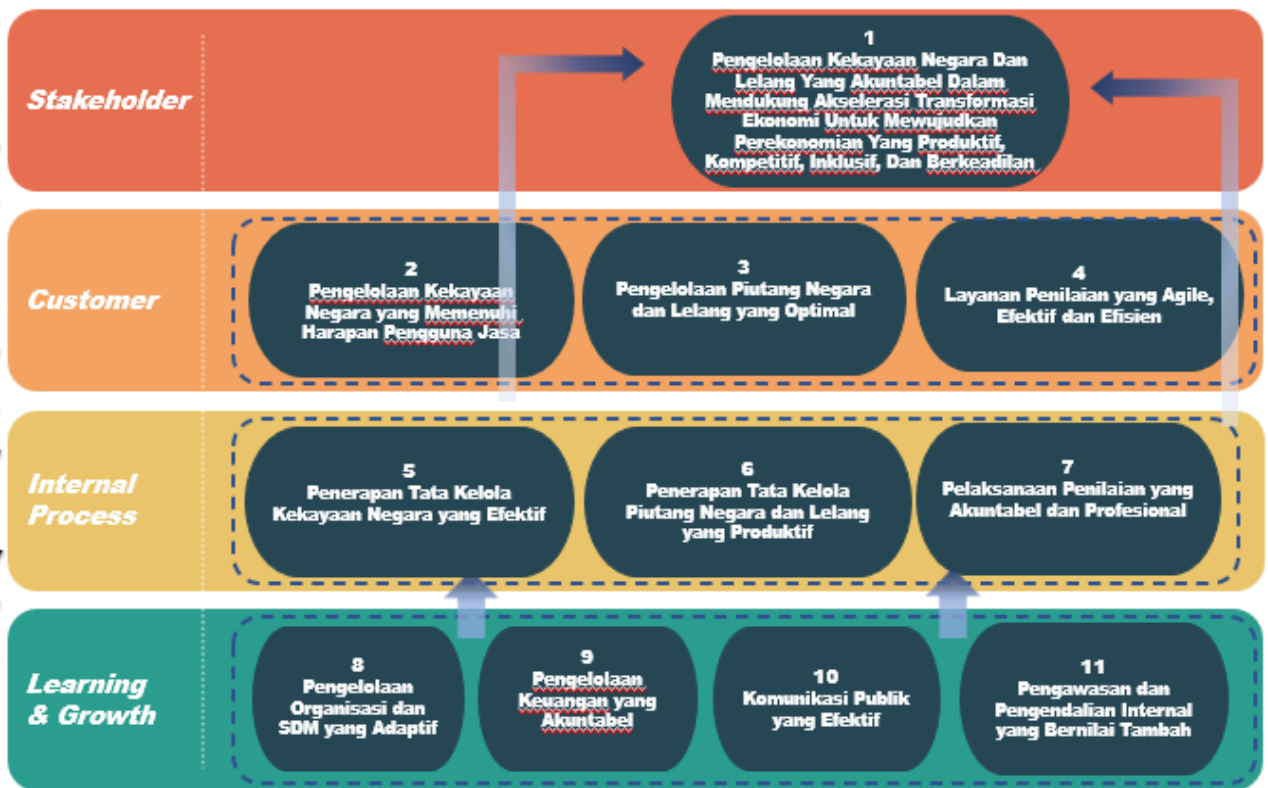
Penyusunan laporan kinerja ini diakui masih banyak kekurangan. KPKNL Palopo siap menerima masukan, saran maupun koreksi untuk segala perbaikan di masa yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK- 4 /WKN.15/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALOPO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

PETA STRATEGI

PERSPECTIVES



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALOPO
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (5,6 M)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86.5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang.	100 (110,8 M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (138 jt)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100 (477)
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100 79 NUP dan 5 Paket
6	Penerapan tata Kelola Piutang negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	85 (11 BKPN)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian.	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pengelolaan Anggaran	100
		9b-CP Pesentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10
		9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
10	Komunikasi publik yang efektif	10b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI /WBK	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	291.896.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	10.764.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	0
3. Pengelolaan Aset	Rp	281.150.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	0
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	0
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	0
Dukungan Manajemen	Rp	1.183.645.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	21.888.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.141.276.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	10.177.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	0
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	10.304.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp	0

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono



Ditandatangani Secara Elektronik
Naf'an Widiarso Rafid



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALOPO
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.							
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	20	50	50	70	70	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang.	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif :							
6a-CP	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	100%	100%	100%	92%	92%	85%	85%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10 %	60%	60%	75%	75%	90%	90%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pengelolaan anggaran	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9c.N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	30 %	60%	60%	80%	80%	100%	100%
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
11c-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	-	-	-	-	-	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Palopo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Naf'an Widiarso Rafid



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG PALOPO KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode n	Penanggung	
				Kegiatan	Output			
				Nihil				

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Palopo



Ditandatangani Secara Elektronik
Naf'an Widiarso Rafid



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Naf'an Widiarso Rafid	NAMA	Arif Bintarto Yuwono
NIP	197408071995031001	NIP	196212171992031001
PANGKAT/GOL RUANG	Penata Tingkat I, /IVb	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Mada, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Pemangku Kepentingan
		Indeks Integritas	89,17	Pemangku Kepentingan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5%	Penerima Layanan
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86.5%	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
4.	Layanan Penilaian yang Agile,	Indeks Ketepatan Waktu	75	Penerima Layanan

	efektif, dan Efisien	Penyelesaian Layanan Penilaian		
5.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
6.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	85%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	89%	Proses Bisnis
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Proses Bisnis
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	Penguatan Internal atau anggaran
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau anggaran
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pengelolaan anggaran	100%	Penguatan Internal atau anggaran
		Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau anggaran
		Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%	Penguatan Internal atau anggaran
10	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau anggaran
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau anggaran
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	100	Penguatan Internal atau anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	

PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA

-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Naf'an Widiarso Rafid
NIP 197408071995031001



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	. 21 pegawai							
2.	. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
	Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target					
			Q1	Q2	Smt. 1	Q3 s.d.Q3	Q4	Y
	1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.						
	1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1b-CP	Indeks Integritas	20	50	50	70	70	89,17
	2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5

2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang.	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif :							
6a-CP	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	100%	100%	100%	92%	92%	85%	85%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Pesentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10 %	60%	60%	75%	75%	90%	90%

8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pengelolaan anggaran	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-CP	Pesentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	30 %	60%	60%	80%	80%	100%	100%
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK	-	-	-	-	-	100%	100%

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Naf'an Widiarso Rafid
NIP 197408071995031001

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

